

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Khakim. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Annisa, Y. (2022), *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Bersifat Mendesak Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Asikin, Zainal, H. (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dosminikus Rato. (2010). *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Editus Adisu dan Libertus Jehani. (2006). *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Tangerang: Visi Media.
- Endah Pujiastuti. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.

- H.L.A Hart. (1997). *The Concept Of Law*. New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim. (2010). *Konsep Hukum*. Bandung,: Nusamedia.
- Halim, A. Ridwan. (1990). *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan Nurimansyah. (1981). *Upah Pekerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri*. Jakarta: Prisma
- Husni, Lalu. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Soepomo. (1983). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta, Djambatan.
- Is, M. S., & Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Karsona, A. M., Pujiwati, Y., Rubiati, B., Singadimedja, H., Djakaria, M., & Atje. (2018). *Hukum Otonom dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Logoz Publishing.
- Lon L. Fuller. (1969). *The Morality of Law*, revised edition. London: Yale University Press.
- Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.

- Mohd. Syaufi. (2009). *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum* cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sendjun H. Manulang. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta, Jakarta.
- Senjun H Manululang. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Soebekti. (1984). *Hukum Perjanjian*, Cet. VIII. Jakarta: PT Internas
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 18. Depok: Rajagrafindo Persada.

Soetjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sudjono, Wiwono. (1970). *Persetudjuan Perburuhan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada Yogyakarta.

Sulaiman, A., & Wali, A. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Supramono Gatot. (2007). *Kedudukan Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta

Sutedi Adrian. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Ashabul Khafi. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Jurisprudentie* Vol. 3. No. 2 2016.

Butarbutar, E. N. (2011). Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 470-479.

Erica Gita Mogi. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Administratum* Vol. 5. No. 2 2017.

- Fahmi, A., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Bersifat Mendesak yang Terkualifikasi Perbuatan Pidana tanpa Pemberitahuan. *Novum Jurnal Hukum*, 11-27.
- Niru Anita Sinaga. Perlindungan Hukum Hak-Hak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Teknologi Industri* Vol. 6. 2016.
- Ujang Chandra S. Karakteristik Undang – Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Wawasan Yuridika* Vol. 32. No. 1. 2015.
- Fithriatus Shalihah. Impelementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. *Selat* Vol. 4. No. 1. 2016.
- Moh. Maruf. Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Ketidak Kooperatifan Perusahaan Dalam Memberikan Hak Karyawan Setelah Di PHK. *Accounting Management* Vol. 5. No. 1. 2021.
- Nikodemus Maringan. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3. No. 3. 2015.
- Rachmat Trijono. 2014. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: *Papas Sinar Sinanti*.
- Indah Sari. Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

- Ketenagakerjaan. *Mitra Manajemen* Vol. 6. No. 2. 2020.
- Yuliana Yuli W. Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja Di Perseroan Terbata (PT). *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2. 2018.
- Taun Taun. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Pekerja Asing Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *De Jure* Vol. 12. No. 2. 2020.
- Suwarti. Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja. *Khairun Law Jurnal* Vol. 2. No. 1. 2018.
- Hanna Messiah Rahmah. Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Pekerja Asing di Indonesia, *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 7, No. 1 2015.
- Hwian Christianto. Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transpalasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”. *Mimbar Hukum* Vol. 23. No. 1. 2011.
- Ahmad Zaini. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan” *Al ahkam* Vol. 13. No. 1. 2017.
- Leonardo Imanuel Terok. Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Di Kenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak. *Lex Et Societatis* Vol. 3.No. 7. 2015.
- Saprudin. Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan

Pengupahan. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, 2012.

Rujukan Elektronik

Achmad Nasrudin Yahya, 7 Oktober 2020, "*Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh-halaman all*," KOMPAS.com,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06503791/dari-kontrak-seumur-hidup-hingga-phk-sepihak-ini-8-poin-uu-cipta-kerja-yang?page=all>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Achmad Nasrudin Yahya, 7 Oktober 2020, "*Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh*". KOMPAS.com,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06503791/dari-kontrak-seumur-hidup-hingga-phk-sepihak-ini-8-poin-uu-cipta-kerja-yang?page=all>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Achmadi Julio, 12 Februari 2020, "*Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus*", Tempo.co, <https://en.tempo.co/read/1306889/omnibus-is-throwing-people-and-democracy-under-the-bus>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Achmadi Julio, 2 Februari 202, "*Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus*", Tempo.co, <https://en.tempo.co/read/1306889/omnibus-is-throwing-people-and-democracy-under-the-bus>

throwing-people-and-democracy-under-the-bus, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Ade Miranti Karunia, 7 Oktober 2020, "*UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!*". KOMPAS.com, <https://money.kompas.com/read/2020/10/07/202100226/umk-dihapuskan-dalam-uu-cipta-kerja-menaker-saya-tegaskan-upah-minimum?page=all>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Adrian Walil Akhlaq, 24 Februari 2020, "*5 things you need to know about omnibus bill on taxation*", The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/24/5-things-you-need-to-know-about-omnibus-bill-on-taxation.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik, "*Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TP) sebesar 6,26%*", <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik, 5 Mei 2021, "*Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 6,26 persen*", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021-->

tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

BBC News, "*Indonesia: Thousands protest against 'omnibus law' on jobs*", <https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Dipna Videlia Putsanra, 6 Oktober 2020, "*Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan 13/2003*". [tirto.id. Tirto.id, https://tirto.id/beda-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dan-uu-ketenagakerjaan-13-2003-f5Dv](https://tirto.id/beda-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dan-uu-ketenagakerjaan-13-2003-f5Dv), diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Dipna Videlia Putsanra, 7 Oktober 2020, "*Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah*", [Tirto.id, https://tirto.id/poin-poin-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-soal-pesangon-hingga-upah-f5EK](https://tirto.id/poin-poin-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-soal-pesangon-hingga-upah-f5EK), diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Ghina Ghalia, 6 Oktober 2020, "*Indonesia passes jobs bill as recession looms*", *The Jakarta Post*, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/06/indonesia-passes-jobs-bill-as-recession-looms.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Rizal Jawahir Gustav, 5 Oktober 2020, "*Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja*". *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Samboh Esther, 24 Februari 2020, "*Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes*", The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/21/guide-to-omnibus-bill-on-job-creation-1028-pages-in-8-minutes.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Sintia, V. (2023). Arti Due Process of Law. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>.

Worldometers. (2024). Covid-19 Coronavirus Pandemic, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Perundangan-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial